KONTEN REAKSI DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Putu Gede Gangga Mahotama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: mahotamagangga@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i01.p3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konten reaksi di YouTube dan pengaruhnya terhadap pemahaman serta implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital global, serta mengevaluasi sejauh mana konten reaksi dapat dianggap sebagai penggunaan wajar (fair use) dalam hukum hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang relevan dengan permasalahan copyright di era platform digital, khususnya YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan konten reaksi telah menantang interpretasi tradisional tentang fair use dan transformative work, menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih nuansa dalam penerapan hukum HKI di era digital. Terdapat perbedaan signifikan antara regulasi penggunaan wajar di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan AS memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif. Penentuan fair use dalam konten reaksi masih merupakan area abu-abu yang memerlukan penilaian kasus per kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan dan harmonisasi hukum hak cipta global, serta peningkatan literasi digital bagi kreator konten. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem kreativitas digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: YouTube, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Konten Reaksi

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of reaction content on YouTube and its impact on the understanding and implementation of Intellectual Property Rights (IPR) in the global digital era, as well as evaluate the extent to which reaction content can be considered fair use under copyright law. The research method used is juridical-normative, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to copyright issues in the digital platform era, particularly YouTube. The results show that the development of reaction content has challenged traditional interpretations of fair use and transformative work, creating a need for a more nuanced approach in applying IPR laws in the digital era. There are significant differences between fair use regulations in Indonesia and the United States, with the US having a more comprehensive legal framework. Determining fair use in reaction content remains a gray area requiring case-by-case assessment. This study concludes that there is a need for updating and harmonizing global copyright laws, as well as improving digital literacy for content creators. Recommendations are provided to strengthen collaboration among stakeholders to create a sustainable and equitable digital creativity ecosystem.

Key Words: YouTube, Intellectual Property Rights, Reaction Content

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau lazim dikenal dengan istilah HAKI merupakan hak yang dihasilkan melalui proses pengolahan pikiran manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang memberikan kegunaan bagi masyarakat. Pada intinya, HAKI dapat dipahami sebagai hak untuk mengeksplorasi secara ekonomis suatu karya yang lahir dari kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual

mencakup karya-karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan tujuan utama dibentuknya HAKI adalah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta, baik individu maupun kelompok, atas kontribusi mereka dalam menghasilkan karya cipta yang memiliki nilai ekonomis. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual milik pihak lain, serta meningkatkan kompetisi, khususnya dalam aspek komersialisasi karya intelektual. Keberadaan HAKI diharapkan mampu mendorong para kreator untuk terus berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi yang layak dari masyarakat atas kontribusi intelektual mereka.¹

Hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mencakup hak-hak yang melindungi karya intelektual, inovasi, dan penciptaan. Ini termasuk hak cipta untuk karya seni, hak paten untuk penemuan, hak merek untuk identifikasi produk, dan hak desain industri untuk produk visual. Negara hukum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum terkait HAKI. Negara harus memiliki kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Ini mencakup pembuatan undang-undang, peraturan, dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya. Negara harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAKI.²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan mekanisme yuridis untuk mengamankan produk kreativitas intelektual manusia dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, sains, hingga ekspresi artistik. Sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia berkewajiban mengimplementasikan standar internasional melalui ratifikasi perjanjian seperti GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan Agreement TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang secara komprehensif mengatur perlindungan HKI dalam konteks perdagangan global. Konsekuensi dari komitmen ini adalah keharusan Indonesia untuk merancang dan memberlakukan instrumen hukum nasional yang selaras dengan protokol internasional, guna melindungi hak-hak kekayaan intelektual secara sistematis dan berkelanjutan. Proses ini tidak sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan upaya strategis untuk mengintegrasikan sistem hukum nasional ke dalam tata kelola ekonomi dan perdagangan internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung.³

Perlindungan kekayaan intelektual menghadapi dinamika yang semakin rumit dan menuntut strategi adaptif. Transformasi teknologi telah mengubah paradigma perlindungan hak cipta, dengan kompleksitas yang meningkat seiring berkembangnya platform digital dan mekanisme berbagi informasi. Ekosistem digital saat ini memunculkan tantangan multidimensional, mulai dari pembajakan online, reproduksi konten tanpa izin, hingga persoalan kepemilikan intelektual dalam ruang maya. Kerangka hukum dituntut untuk responsif terhadap inovasi teknologi, namun tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreator dan semangat keterbukaan informasi. Diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak sekadar bersifat represif, melainkan preventif dan edukatif. Regulasi modern mesti mampu mendorong sistem yang melindungi karya intelektual sambil tetap membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan dan pengembangan kreativitas. Harmonisasi kepentingan ekonomi, sosial, dan technological menjadi kunci utama dalam menjawab kompleksitas perlindungan

¹ Hafsari, Yuliana Maulidda Hafsari. "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 733-743.

² Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55.

³ Santoso, Agus Prio, Tri Wisudawati, dan Sulistyowati, Ecclesia. HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).
Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 01 Tahun 2025, hlm. 24-35

HKI di era digital.⁴

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi penggerak utama perubahan di berbagai aspek kehidupan. Globalisasi telah menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan perkembangan teknologi secara eksponensial. Dalam konteks ini, munculnya platform digital menjadi sangat signifikan karena dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi secara global. Perkembangan infrastruktur teknologi yang pesat telah memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang saling terhubung, memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi lintas batas negara. Platform digital, seperti media sosial, e-commerce, dan layanan streaming, telah mengubah lanskap bisnis dan interaksi sosial secara fundamental. Globalisasi teknologi ini memungkinkan individu dan organisasi untuk menjangkau audiens global, membuka peluang baru dalam hal ekonomi digital dan pertukaran budaya.⁵

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi telah menghadirkan beragam platform digital sosial yang revolusioner, salah satunya adalah *YouTube*. Platform berbagi video ini merupakan manifestasi nyata dari konvergensi antara globalisasi dan inovasi teknologi digital. *YouTube* tidak hanya menjadi wadah bagi individu untuk memposting video yang mereka ciptakan, tetapi juga telah berkembang menjadi ekosistem konten yang kompleks dan dinamis. Melalui platform ini, kreator konten dari berbagai latar belakang dan negara dapat menjangkau audiens global, mendobrak batasan geografis dan budaya.⁶

Fenomena ini mencerminkan demokratisasi media yang dibawa oleh globalisasi teknologi, di mana setiap orang dengan akses internet kini memiliki potensi untuk menjadi produsen konten sekaligus konsumen. Video-video yang diunggah ke *YouTube* dapat ditonton oleh viewer dari beragam kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dari bermacam lapisan masyarakat dan belahan dunia. Hal ini tidak hanya mengubah lanskap hiburan dan informasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam hal pemasaran digital, pembelajaran jarak jauh, dan diplomasi budaya. Lebih jauh lagi, *YouTube* sebagai produk globalisasi teknologi telah menciptakan ekonomi kreatif baru, di mana *content creator* dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi video mereka. Ini menunjukkan bagaimana platform digital tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan mengonsumsi konten, tetapi juga mentransformasi model bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru di era digital global.⁷

Kemunculan permasalahan hak cipta (*copyright*) dalam konten-konten di *YouTube* merupakan konsekuensi kompleks dari demokratisasi produksi dan distribusi konten di era digital global. Beberapa faktor utama berkontribusi terhadap masalah ini: pertama, kemudahan akses teknologi digital yang memungkinkan siapa saja menjadi kreator konten, namun tidak selalu diimbangi dengan pemahaman memadai tentang hukum hak cipta; kedua, berkembangnya budaya remix dan mash-up yang sering berbenturan dengan konsep tradisional hak cipta, memunculkan perdebatan tentang batas antara penggunaan wajar (*fair use*) dan pelanggaran; ketiga, sifat global *YouTube* yang

⁴ Akbar, Sheva Anneira, A. Mulia Rahmadinah Adnan, dan Fikri Aiman Naufal Azmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 4 (2024): 11-22.

⁵ Kurniawan, Fuat Edi dan Norman Luther Aruan. "Digitalisasi dan Pola Kerja Baru: Dampak Bagi Industrialisasi dan Respons Kebijakan Ketenagakerjaan," *Jurnal Sositologi* 20, no. 3 (2021): 395-409.

⁶ Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, dan Koesumah, Evan. *Sejarah Youtube* (TEMPO PUBLISHING, 2024).

⁷ Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 146-162.

mempersulit penegakan hukum hak cipta yang berbeda-beda di setiap negara; dan keempat, model bisnis *YouTube* yang menciptakan insentif bagi eksploitasi karya orang lain demi keuntungan finansial. Merespons ini, *YouTube* mengembangkan sistem *Content ID*, namun teknologi ini juga menimbulkan kontroversi karena potensi *false positive*-nya. Lebih luas lagi, situasi ini memicu debat tentang kebutuhan reformasi hukum hak cipta di era digital, mengingat kecepatan perkembangan teknologi jauh melampaui adaptasi hukum. Kompleksitas ini mencerminkan tantangan besar dalam mengelola hak kekayaan intelektual di era digital global, menuntut kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan karya intelektual dan dorongan inovasi dalam lanskap media yang terus berevolusi.⁸

Dari berbagai macam konten yang tersedia di *YouTube*, salah satu jenis yang telah mendapatkan popularitas signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah konten reaksi atau "*reaction videos*". Dalam format ini, seorang *content creator* membuat video yang menampilkan respons mereka terhadap konten yang sudah ada, seperti musik, film, acara TV, atau bahkan video viral lainnya. Konten reaksi ini bukan sekadar menampilkan ekspresi wajah atau komentar spontan dari kreator, tetapi seringkali disertai dengan analisis mendalam, kritik, atau perspektif unik yang menambah nilai pada konten asli yang dibahas. Yang membedakan konten reaksi berkualitas dari sekadar menonton ulang adalah tambahan informatif atau *review* yang diberikan oleh kreator. Ini bisa berupa penjelasan konteks historis atau kultural, analisis teknis (misalnya untuk video musik atau film), atau bahkan pembahasan implikasi sosial dari konten yang direaksikan. Dengan cara ini, kreator berusaha memberikan perspektif baru atau wawasan yang mungkin terlewatkan oleh penonton biasa, sehingga menciptakan pengalaman menonton yang lebih kaya dan edukatif.

Popularitas konten reaksi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, ada aspek sosial dan emosional dari melihat orang lain bereaksi terhadap sesuatu yang kita kenal, yang dapat menciptakan rasa koneksi dan komunitas di antara penonton. Kedua, konten reaksi sering kali berfungsi sebagai pintu gerbang untuk menemukan konten baru atau memahami konten lama dari sudut pandang yang berbeda. Terakhir, bagi banyak penonton, melihat reaksi ahli atau influencer terhadap suatu konten dapat membantu mereka membentuk pendapat mereka sendiri atau memperdalam apresiasi mereka terhadap konten tersebut.

Namun, genre konten reaksi juga tidak lepas dari kontroversi dan tantangan hukum. Pertanyaan seputar hak cipta dan penggunaan wajar sering muncul, terutama ketika kreator menggunakan porsi signifikan dari karya orang lain dalam video mereka. Beberapa pemilik konten asli memandang video reaksi sebagai bentuk eksploitasi, sementara yang lain melihatnya sebagai promosi gratis. Hal ini telah menyebabkan beberapa kasus hukum profil tinggi dan perdebatan berkelanjutan tentang batas-batas kreativitas dan hak kekayaan intelektual di era digital. Terlepas dari kontroversi, konten reaksi tetap menjadi bagian integral dari lanskap *YouTube*, mencerminkan sifat interaktif dan komunal dari media sosial modern. Seiring berkembangnya platform dan teknologi, bentuk dan format konten reaksi kemungkinan akan terus berevolusi, mungkin menggabungkan elemen seperti realitas virtual atau interaksi langsung dengan penonton, sambil tetap mempertahankan esensi dasarnya yaitu berbagi pengalaman dan perspektif melalui lensa konten yang sudah ada.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah penelitian terdahulu sebagai acuan dan perbandingan. Dalam analisis hukum terhadap konten reaksi di *YouTube*, Fitri Astari Asril, dkk. dalam penelitian "*Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube*" menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pencipta dan kreator konten akibat regulasi yang belum spesifik dan mekanisme hukum

⁸ Fernando, Angelo, Catherine Aureulli Chandra, dan Jimmy, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 235-258.
Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 01 Tahun 2025, hlm. 24-35

yang belum efektif.⁹ Libri Annisa Firdayasa Handoko dan Kurnia Khafidatur Rafi'ah dalam "Local Viewer Preferences for Video Reaction Content About Indonesia by Creators on YouTube" menyoroti popularitas konten reaksi di YouTube, meskipun format ini sering kali menggunakan materi berhak cipta tanpa izin.¹⁰ Sementara itu, Nurhijriati dan Eka Kurniasari dalam "Regulation and Application of Fair Use Doctrine on the YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Laws" membandingkan regulasi *fair use* di Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Indonesia dinilai belum memiliki batasan hukum yang jelas untuk melindungi hak cipta maupun mendukung kreativitas digital.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan ketiga studi sebelumnya karena penulis menganalisis perkembangan konten reaksi di YouTube mempengaruhi pemahaman dan implementasi hak kekayaan intelektual di era digital global, serta menjelaskan sejauh mana konten reaksi dapat dianggap sebagai "penggunaan wajar" (*fair use*) dalam hukum hak cipta di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada dua rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana perkembangan konten reaksi di YouTube mempengaruhi pemahaman dan implementasi hak kekayaan intelektual di era digital global?
2. Sejauh mana konten reaksi dapat dianggap sebagai "penggunaan wajar" (*fair use*) dalam hukum hak cipta di era digital?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan konten reaksi di YouTube mempengaruhi pemahaman dan implementasi hak kekayaan intelektual di era digital global, serta sejauh mana konten reaksi dapat dianggap sebagai *fair use* dalam hukum hak cipta di era digital.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.¹² Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan *copyright* di era platform digital, khususnya YouTube. Bahan hukum primer yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan nasional terkait hak cipta, serta kebijakan dan pedoman resmi YouTube mengenai hak cipta. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal akademik, buku-buku hukum, dan artikel ilmiah yang membahas interseksi antara hukum hak cipta, globalisasi, dan teknologi digital. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk

⁹ Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 146-162.

¹⁰ Handoko, Libya Annisa Firdayasa, dan Kurnia Khafidatur Rafi'ah. "Local Viewer Preferences for Video Reaction Content about Indonesia by Creators on YouTube." *Southeast Asian Business Review* 1, no. 1 (2023): 33-46.

¹¹ Nurhijriati dan Eka Kurniasari, "Regulation and Application of Fair Use Doctrine on the YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Laws," *Student Journal of International Law* 3, no. 2 (2023): 166-176.

¹² Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

memperjelas istilah-istilah teknis. Langkah pertama penelitian ini melibatkan pengumpulan dan inventarisasi bahan-bahan hukum tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Konten Reaksi di YouTube Mempengaruhi Pemahaman dan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Global

Konten reaksi adalah salah satu format yang sering digunakan untuk mengikuti tren di dunia media sosial dan platform video. Jenis konten ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah kebutuhan modal yang relatif rendah dibandingkan dengan jenis konten lainnya, seperti parodi atau remake. Dalam membuat konten reaksi, para kreator tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk produksi. Misalnya, mereka tidak perlu melakukan perjalanan ke lokasi tertentu, menanggung biaya akomodasi, atau membeli produk-produk mahal untuk diulas.¹³

Perkembangan konten reaksi di *YouTube* telah membawa dimensi baru dalam diskusi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital global. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara kreator berinteraksi dengan konten yang sudah ada, tetapi juga menantang interpretasi tradisional tentang *fair use* dan *transformative work* dalam konteks hukum hak cipta. Konten reaksi di *YouTube* umumnya melibatkan kreator yang merekam respons mereka terhadap video, musik, atau konten lain yang sudah ada. Menurut Pedoman Hak Cipta *YouTube*, konten semacam ini dapat dianggap sebagai "karya transformatif" jika memenuhi kriteria tertentu, seperti menambahkan nilai baru melalui komentar, kritik, atau parodi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengakui konsep penggunaan wajar (*fair use*) dalam Pasal 43-51. Namun, penerapannya dalam konteks konten reaksi masih abu-abu. Di sisi lain, *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat memberikan perlindungan lebih eksplisit untuk konten transformatif, yang sering kali menjadi acuan bagi platform global seperti *YouTube*. *YouTube* sendiri telah mengembangkan sistem *Content ID* untuk mendeteksi penggunaan materi berhak cipta. Namun, sistem ini sering kali menghadapi kritik karena ketidakmampuannya membedakan antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan yang sah dalam konteks konten reaksi.¹⁴

Sifat lintas batas *YouTube* membuat penerapan hukum hak cipta menjadi kompleks. Apa yang dianggap *fair use* di satu negara mungkin dianggap pelanggaran di negara lain. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreator konten reaksi yang memiliki audiens global. Popularitas konten reaksi telah mendorong pergeseran dalam pemahaman publik tentang HKI. Banyak penonton dan kreator mulai mempertanyakan batas-batas tradisional hak cipta dan mendorong interpretasi yang lebih fleksibel tentang *fair use* di era digital.

Beberapa pemegang hak cipta telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap konten reaksi, mengenali potensinya sebagai alat promosi. Namun, banyak yang tetap protektif terhadap karya mereka, mengarah pada konflik berkelanjutan dengan kreator konten reaksi. Konten reaksi juga telah menciptakan ekosistem ekonomi baru di *YouTube*, dengan beberapa kreator menghasilkan pendapatan signifikan dari genre ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pembagian keuntungan yang adil antara kreator konten reaksi dan pemegang hak cipta asli.

Organisasi internasional seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*) telah mulai mempertimbangkan perlunya harmonisasi hukum hak cipta global untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh platform digital seperti *YouTube*. Organisasi ini telah merancang dua perjanjian internasional, yang selanjutnya disebut WIPO *Internet*

¹³ Handoko, Libya Annisa Firdayasa, dan Kurnia Khafidatur Rafi'ah. "Local Viewer Preferences for Video Reaction Content about Indonesia by Creators on YouTube." *Southeast Asian Business Review* 1, no. 1 (2023): 33-46.

¹⁴ Lestari Nanda, Sartika. "PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019). *Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 01 Tahun 2025, hlm. 24-35*

Treaties, yang bersifat spesifik untuk melindungi hak cipta di ranah digital. Konvensi ini mendorong negara-anggota, termasuk Indonesia, untuk merevisi kerangka hukum nasional dengan mengintegrasikan ketentuan perlindungan teknologi dalam rezim hak cipta, sebagai respons sistematis terhadap tantangan baru perlindungan karya intelektual di era digital.¹⁵ Namun, perbedaan dalam sistem hukum dan kepentingan nasional membuat proses ini sulit. Meningkatnya kompleksitas isu HKI di era konten reaksi menekankan pentingnya pendidikan dan literasi digital. *YouTube* telah meluncurkan inisiatif seperti *Creator Academy* untuk mendidik kreator tentang hak cipta, namun masih ada kebutuhan untuk upaya yang lebih luas.

Beberapa negara telah mulai mempertimbangkan pembaruan undang-undang hak cipta mereka untuk lebih baik mengakomodasi realitas platform digital. Misalnya, Uni Eropa telah mengadopsi *Directive on Copyright in the Digital Single Market* yang mencoba menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna platform digital. Perkembangan konten reaksi di *YouTube* telah secara signifikan mempengaruhi pemahaman dan implementasi HKI di era digital global. Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih nuansa dalam interpretasi hukum hak cipta, serta kolaborasi antara pembuat kebijakan, platform teknologi, kreator konten, dan pemegang hak cipta untuk menavigasi lanskap HKI yang terus berevolusi. Sementara tantangan tetap ada, perkembangan ini juga membuka peluang untuk mendefinisikan ulang konsep kreativitas dan inovasi di era digital.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 telah mencoba mengakomodasi perkembangan teknologi digital, masih ada kebutuhan untuk interpretasi dan mungkin revisi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh konten reaksi dan bentuk-bentuk baru kreativitas digital lainnya. Diperlukan dialog antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, kreator konten, dan platform teknologi untuk merumuskan pendekatan yang seimbang. Perkembangan konten reaksi di *YouTube* juga telah memunculkan diskusi tentang etika dalam kreativitas digital. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun secara teknis legal, penggunaan berlebihan konten orang lain dalam konten reaksi dapat dianggap tidak etis atau merugikan kreator asli. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan penghargaan terhadap karya orang lain.¹⁶

Fenomena konten *reaction* di *YouTube* telah mendorong inovasi dalam model bisnis dan praktik industri kreatif. Beberapa pemegang hak cipta telah mulai berkolaborasi secara proaktif dengan kreator konten reaksi, melihatnya sebagai bentuk baru pemasaran dan engagement dengan audiens. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap lanskap digital yang berubah tidak hanya memerlukan respons hukum, tetapi juga perubahan dalam strategi bisnis dan praktik industri. Perkembangan konten reaksi di *YouTube* telah secara signifikan mempengaruhi pemahaman dan implementasi HKI di era digital global. Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih nuansa dalam interpretasi hukum hak cipta, serta kolaborasi antara pembuat kebijakan, platform teknologi, kreator konten, dan pemegang hak cipta untuk menavigasi lanskap HKI yang terus berevolusi. Sementara tantangan tetap ada, perkembangan ini juga membuka peluang untuk mendefinisikan ulang konsep kreativitas, inovasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Diperlukan keseimbangan yang cermat antara perlindungan hak pencipta, kebebasan berekspresi, dan dorongan inovasi untuk memastikan bahwa ekosistem kreativitas digital dapat berkembang secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

¹⁵ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80.

¹⁶ P. Manurung, Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 1-19
Jurnal Kertha Wicara Vol 15 No 01 Tahun 2025, hlm. 24-35

3.2. Konten Reaksi Dapat Dianggap sebagai Fair Use Dalam Hukum Hak Cipta di Era Digital

Fair use adalah doktrin hukum yang mengizinkan seseorang untuk mereproduksi karya tanpa perlu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Di beberapa negara, istilah *fair use* dikenal sebagai *fair dealing*, yang merupakan pengecualian terbatas terhadap hak eksklusif kekayaan intelektual. Pengecualian ini memungkinkan reproduksi atau penggunaan material yang dilindungi untuk studi pribadi, asalkan disertai dengan pengakuan yang tepat atau wajar.¹⁷

Penggunaan wajar atau *fair use* telah digunakan sebagai pembelaan terhadap klaim pelanggaran hak cipta dalam berbagai kasus selama tiga puluh tahun terakhir, seperti ketika seseorang mengambil ekspresi dari karya sebelumnya untuk diparodikan, mengutip dari karya sebelumnya dalam mempersiapkan karya baru tentang subjek yang sama, menerbitkan foto sebagai bagian dari berita, membuat salinan waktu tayang dari program televisi, memfotokopi dokumen untuk diserahkan sebagai bukti dalam litigasi, melakukan rekayasa balik program komputer untuk mendapatkan akses ke informasi antarmuka, menyimpan *cache* situs web untuk mempercepat akses ke mereka, atau menyediakan tautan ke gambar yang tersedia di Internet.¹⁸

Fair use atau penggunaan wajar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 26 UUHC mengatur pembatasan perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukkan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran dalam empat kategori, meliputi penggunaan kutipan singkat untuk laporan peristiwa aktual, penggandaan untuk penelitian ilmiah dan pengajaran, serta penggunaan untuk kepentingan pendidikan tanpa izin. Pembatasan ini hanya berlaku untuk ciptaan dan produk terkait dari ketiga entitas tersebut. Selanjutnya, Bab VI UUHC mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pasal 43 UUHC menetapkan bahwa pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan lambang negara, lagu kebangsaan, karya pemerintah, berita aktual, dan potret pejabat negara tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan beberapa syarat dan pengecualian.¹⁹

Pasal 44 Ayat (1) Huruf A UUHC lebih lanjut mengatur bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap dan digunakan untuk keperluan tertentu. Keperluan ini mencakup pendidikan (sepanjang tidak merugikan kepentingan sah dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta), dengan mempertimbangkan kepentingan negara dalam hal keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, proses legislatif, dan sistem peradilan, serta memiliki tujuan edukatif dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pertunjukan atau pementasan yang diselenggarakan tanpa pemungutan biaya. Penting untuk dicatat bahwa 'kepentingan yang wajar' dimaknai sebagai keseimbangan dalam menerima manfaat ekonomi yang terkandung dalam suatu karya cipta. Dengan demikian, UUHC berupaya menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap informasi dan pengetahuan.²⁰

¹⁷ Murfianti, Fitri. "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital." *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya* 12, no. 1 (2020): 44-58.

¹⁸ Sulasno, Inge Dwisvimiari. "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 425-437.

¹⁹ Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, dan Reihan Ahmad Millaudy. "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 130-148.

²⁰ Ibid

Di Amerika Serikat, regulasi dan penerapan penggunaan wajar (*fair use*) pada platform *YouTube* berdasarkan hukum Amerika Serikat diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat tahun 1976, khususnya pada bagian 106 dan 107, serta Undang-Undang Hak Cipta Digital Milenium (DMCA) tahun 1998. Istilah "penggunaan wajar" mengacu pada doktrin hukum di Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna *YouTube* untuk menggunakan kembali materi berhak cipta tanpa izin pemilik hak cipta dalam kategori dan batasan tertentu. Bagian 106 memperbolehkan penggunaan wajar karya berhak cipta untuk tujuan kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, atau pendidikan. Sementara itu, Bagian 107 merinci empat faktor penentu untuk membedakan antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta, yaitu: tujuan dan sifat penggunaan, sifat karya berhak cipta, jumlah dan pentingnya bagian yang digunakan, serta efek potensial terhadap pasar. Di Amerika Serikat, hakim memutuskan kasus yang melibatkan penggunaan wajar atau pelanggaran hak cipta berdasarkan empat faktor tersebut.²¹

Penerapan penggunaan wajar pada platform *YouTube* di Amerika Serikat memungkinkan pengguna *YouTube* untuk menerapkannya dalam video mereka selama tidak melampaui parameter pembatasan regulasi penggunaan wajar. Hal ini termasuk menambahkan konten baru yang memiliki karakter berbeda dari yang asli dan bersifat non-komersial. *YouTube* dapat menggunakan materi berhak cipta untuk keperluan komentar, penelitian, pengajaran atau pendidikan, dan pelaporan berita, dengan parameter pembatasan yang jelas untuk menentukan apakah termasuk penggunaan wajar atau pelanggaran hak cipta. Sebagai produk dari DMCA, Penyedia Layanan Internet (ISP) membatasi tanggung jawab mereka atas penggunaan wajar video *YouTube*. *Content ID* adalah *safe harbor* yang secara otomatis mendeteksi pelanggaran hak cipta tetapi tidak dapat menentukan penggunaan wajar, yang merupakan penilaian subjektif kasus per kasus yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Di Amerika Serikat, penggunaan wajar hanya dapat ditentukan oleh hakim di pengadilan, meskipun regulasi ini mungkin berbeda di negara-negara lain.

Regulasi penggunaan wajar (*fair use*) di Indonesia, khususnya dalam konteks platform *YouTube*, didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal 43 dan 44 undang-undang ini menjadi landasan utama dalam menentukan batasan penggunaan wajar materi berhak cipta. Menurut regulasi ini, penggunaan materi berhak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran jika memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, sumber pemilik hak cipta harus diakui dan disebutkan dengan jelas. Ini berarti kreator harus memberikan kredit yang tepat kepada pemilik asli konten yang digunakan. Kedua, penggunaan tersebut harus bersifat non-profit atau, jika bersifat komersial, harus memiliki tujuan sosial yang jelas seperti pendidikan, pengetahuan, penelitian, atau pengembangan. Kriteria ini memberi ruang bagi penggunaan materi berhak cipta dalam konteks akademis atau edukatif. Ketiga, penggunaan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik hak cipta. Artinya, penggunaan materi tidak boleh mengurangi nilai ekonomi atau potensi pasar dari karya asli. Terakhir, pemilik hak cipta tidak boleh secara eksplisit menyatakan keberatan atas produksi dan distribusi konten yang menggunakan materi mereka.²²

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberikan kerangka dasar untuk penggunaan wajar, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, terutama di platform digital seperti *YouTube*. Ketidakjelasan ini muncul karena tidak adanya regulasi spesifik yang mengatur penggunaan wajar di platform media sosial dan berbagi video.

²¹ Simbolon, Putu George Matthew. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 74–90.

²² Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, dan Millaudy, Reihan Ahmad. HAK CIPTA ERA DIGITAL DAN PENGATURAN DOKTRIN FAIR USE DI INDONESIA (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

Akibatnya, kreator atau *YouTuber* Indonesia sering menghadapi dilema dalam menentukan batas-batas penggunaan wajar ketika membuat dan mempublikasikan konten mereka. Mereka mungkin ragu-ragu dalam menggunakan cuplikan film, musik, atau materi berhak cipta lainnya, bahkan untuk tujuan kritik atau ulasan, karena takut melanggar hak cipta. Ketidajelasan ini juga berdampak pada proses penyelesaian sengketa hak cipta di pengadilan. Hakim mungkin mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus penggunaan wajar karena kurangnya panduan yang spesifik dan terperinci dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum bagi kreator konten.²³

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih komprehensif dan jelas mengenai penggunaan wajar, terutama dalam konteks digital. Undang-Undang Hak Cipta AS tahun 1976, khususnya Bagian 106 dan 107, memberikan kerangka hukum yang lebih terperinci. Bagian 106 secara eksplisit mengizinkan kategori penggunaan wajar karya berhak cipta untuk tujuan spesifik seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, atau pendidikan. Ini memberikan perlindungan yang jelas bagi kreator yang menggunakan materi berhak cipta untuk tujuan-tujuan tersebut. Sementara itu, Bagian 107 menyediakan empat faktor penentu yang jelas untuk membedakan antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi: (1) maksud dan karakteristik penggunaan, baik bersifat komersial maupun non-komersial edukatif; (2) karakteristik karya yang dilindungi hak cipta; (3) kuantitas dan signifikansi bagian yang dimanfaatkan dalam konteks keseluruhan karya; serta (4) dampak penggunaan terhadap nilai dan pasar potensial karya yang bersangkutan. Kejelasan parameter ini memberikan panduan yang lebih pasti bagi kreator dan pengadilan dalam menentukan batas-batas penggunaan wajar.²⁴

Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki Undang-Undang Hak Cipta Digital Milenium (DMCA) tahun 1998, yang secara khusus mengatur tentang hak cipta di era digital. DMCA memberikan perlindungan tambahan bagi pemilik hak cipta sekaligus mengatur tanggung jawab penyedia layanan internet (ISP) dan platform seperti *YouTube*. Undang-undang ini menciptakan sistem "*notice and takedown*" yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar hak cipta mereka. Namun, DMCA juga memberikan perlindungan "*safe harbor*" bagi platform seperti *YouTube*, yang membatasi tanggung jawab mereka atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna, selama mereka mematuhi prosedur *notice and takedown*. Sebagai respons terhadap DMCA, *YouTube* mengembangkan sistem *Content ID*, yang secara otomatis mendeteksi penggunaan materi berhak cipta dalam video yang diunggah. Meskipun *Content ID* efektif dalam mengidentifikasi penggunaan materi berhak cipta, sistem ini tidak dapat menentukan secara otomatis apakah penggunaan tersebut termasuk dalam kategori penggunaan wajar. Penentuan penggunaan wajar tetap menjadi penilaian subjektif yang harus dilakukan kasus per kasus, biasanya oleh pengadilan.

Perbedaan signifikan antara regulasi Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal penggunaan wajar menunjukkan pentingnya kejelasan parameter dalam menangani kasus-kasus hak cipta di era digital. Indonesia dapat belajar dari pendekatan AS dalam menetapkan kriteria yang lebih spesifik untuk menentukan penggunaan wajar, terutama dalam konteks platform digital seperti *YouTube*. Dengan mengadopsi sistem yang lebih terperinci, Indonesia dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi kreator konten, platform digital, dan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus penggunaan wajar. Hal ini dapat mencakup pengembangan kriteria spesifik yang serupa dengan empat faktor yang digunakan di AS, namun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan

²³ Nurhijriati dan Eka Kurniasari, "Regulation and Application of Fair Use Doctrine on the YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Laws," *Student Journal of International Law* 3, no. 2 (2023): 166-176.

²⁴ *Ibid*

regulasi khusus yang mengatur tentang hak cipta di era digital, mirip dengan DMCA di AS. Regulasi semacam ini dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital, serta memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab platform seperti *YouTube* dalam menangani konten yang berpotensi melanggar hak cipta. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terperinci, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kreativitas dan inovasi digital, sambil tetap melindungi hak-hak pemilik kekayaan intelektual.

III. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Perkembangan konten reaksi di *YouTube* telah membawa dampak signifikan terhadap pemahaman dan implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital global. Fenomena ini telah menantang interpretasi tradisional tentang *fair use* dan *transformative work*, memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih nuansa dalam menafsirkan dan menerapkan hukum HKI. Terdapat perbedaan signifikan antara regulasi penggunaan wajar di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan AS memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dan jelas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan dalam penerapannya, terutama di platform digital. Penentuan *fair use* dalam konten reaksi masih merupakan area abu-abu yang memerlukan penilaian kasus per kasus, menekankan pentingnya edukasi dan literasi digital bagi kreator konten. Fenomena ini juga telah mendorong inovasi dalam model bisnis dan praktik industri kreatif, dengan beberapa pemegang hak cipta mulai berkolaborasi secara proaktif dengan kreator konten reaksi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pembaruan dan harmonisasi hukum hak cipta global, mengingat sifat lintas batas dari platform digital seperti *YouTube*. Indonesia dapat belajar dari pendekatan AS dalam menetapkan kriteria yang lebih spesifik untuk menentukan penggunaan wajar dalam konteks digital. Ke depannya, dibutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, platform teknologi, kreator konten, dan pemegang hak cipta untuk menavigasi lanskap HKI yang terus berevolusi. Penyesuaian regulasi, peningkatan literasi digital, dan pengembangan praktik industri yang adaptif akan menjadi kunci dalam menyeimbangkan perlindungan HKI dengan dorongan inovasi di era digital. Dengan pendekatan yang seimbang dan adaptif, ekosistem kreativitas digital dapat berkembang secara berkelanjutan, menguntungkan semua pihak yang terlibat dan mendukung terciptanya keadilan serta kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Santoso, Agus Prio, Tri Wisudawati, dan Ecclesia Sulistyowati. HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).

Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, dan Koesumah, Evan. Sejarah Youtube (TEMPO PUBLISHING, 2024).

Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, dan Millaudy, Reihan Ahmad. HAK CIPTA ERA DIGITAL DAN PENGATURAN DOKTRIN FAIR USE DI INDONESIA (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

JURNAL

Hafsari, Yuliana Maulidda Hafsari. "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 733-743.

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55.

- Akbar, Sheva Anneira, A. Mulia Rahmadinah Adnan, dan Fikri Aiman Naufal Azmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 4 (2024): 11-22.
- Kurniawan, Fuat Edi dan Norman Luther Aruan. "Digitalisasi dan Pola Kerja Baru: Dampak Bagi Industrialisasi dan Respons Kebijakan Ketenagakerjaan," *Jurnal Sosioteknologi* 20, no. 3 (2021): 395-409.
- Fernando, Angelo, Catherine Aureulli Chandra, dan Jimmy, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 235-258.
- Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 146-162.
- Handoko, Libya Annisa Firdayasa, dan Kurnia Khafidatur Rafi'ah. "Local Viewer Preferences for Video Reaction Content about Indonesia by Creators on YouTube." *Southeast Asian Business Review* 1, no. 1 (2023): 33-46.
- Nurhijriati dan Eka Kurniasari, "Regulation and Application of Fair Use Doctrine on the YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United States Laws," *Student Journal of International Law* 3, no. 2 (2023): 166-176.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Lestari Nanda, Sartika. "PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80.
- Murfianti, Fitri. "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital." *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya* 12, no. 1 (2020): 44-58.
- Sulasno, Inge Dwisvimiar. "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 425-437.
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, dan Reihan Ahmad Millaudy. "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 130-148.
- Simbolon, Putu George Matthew. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement," *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 74-90.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266